



MENCAPAI TARGET TRUST BUILDING DENGAN QUICK WIN



foto: SSB



foto: SSB

MENJADI SOSOK PELAYAN YANG IDEAL BAGI MASYARAKAT, MERUPAKAN SEBUAH KOMITMEN YANG TERUS DIPEGANG KUAT OLEH SELURUH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, YANG SAAT INI BERADA DALAM KEPEMIMPINAN JENDERAL POL BAMBANG HENDARSO DANURI (BHD).

BHD memang pernah berjanji di hadapan anggota dewan dan publik saat penyampaian visi dan misi dalam fit and proper test bahwa di tahun 2010 target trust building harus dicapai dengan melakukan pelayanan publik dan pembersihan internal.

Ada komitmen, berarti ada pula tugas dan tanggungjawab yang harus dipenuhi. Maka BHD pun berusaha menguatkan komitmen tersebut dengan mencanangkan program "Quick Win", program unggulan dalam rangka akselerasi reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan jajaran kepolisian kepada masyarakat. Ada empat hal di dalam program Quick Win, yakni quick respon terhadap laporan yang masuk; transparansi pelayanan

SIM, STNK, dan BPKB; transparansi rekrutmen Polri; dan transparansi dalam proses penyidikan yaitu yang disebut SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan).

Quick Wins merupakan salah satu usaha Polri untuk terus memperbaiki diri dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Mengutip pendapat Direktur Lalulintas Mabes Polri Brigjen Pol Drs Djoko MSi, program "quick win," sejatinya merupakan implementasi nyata dari reformasi birokrasi yang berpijak pada komitmen untuk mau berubah dalam budaya kerja yang lebih baik dan secara terus menerus melakukan perubahan dalam rangka menuju ke hal yang lebih baik.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan longgarnya pengawasan di lapangan merupakan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kampanye reformasi birokrasi ini. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi dari seluruh anggota Polri dan juga peran aktif masyarakat untuk ikut serta memberikan pengawasan terhadap berjalan atau tidaknya program reformasi ini.

PEMILIHAN strategi Quick Win bisa jadi merupakan jawaban tepat dan cocok dipilih untuk menjalankan komitmen tersebut. Hanya saja dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara kontinyu, bukan sekedar semangat di awal.

Aziz Syamsudin, anggota Komisi III DPR, menyambut baik pencanangan program tersebut, dengan sebuah catatan bahwa Polri jangan hanya melakukan gebrakan di awal dengan semangat menggebu-gebu, namun juga harus mempertahankan konsistensi program-program yang diunggulkan tersebut. "Karena yang lebih penting adalah kontinuitas program," tegas Aziz Syamsudin.



Senada dengan Aziz Syamsudin, Brigjen Pol Djoko Susilo mengatakan, Quick Win tidak boleh berhenti hanya pada satu program insidental saja. Tapi lebih jauh, harus bisa menciptakan budaya kerja yang selalu mengikuti perubahan, dinamis dan berorientasi pada profesionalisme. "Dan ini harus menjadi kebutuhan institusi," katanya. Artinya, semangat anggota Polri untuk selalu berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam rangka menuju profesionalisme tidak boleh stagnan, harus terus berlanjut mengikuti dinamika masyarakat yang terus

berkembang. "Dan pada perkembangannya, program "quick win" tidak lagi sekedar action plan organisasi saja, tetapi menjadi kebutuhan setiap anggota Polri di setiap lapisan dan jajaran.

Sedangkan Nursjahbani Katjasungkana, juga dari Komisi III DPR, menilai pencanangan program Quick Win, khususnya yang berkaitan dengan program unggulan Transparansi Proses Penyidikan melalui Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). "Penerbitan SP2HP sebetulnya bukanlah hal baru karena sebelumnya memang sudah dilakukan Polri. "Peluncuran itu harus dilihat sebagai penguatan saja. Memperbarui komitmen dan memberi tahu ke masyarakat bahwa itu (SP2HP) masih ada," tandasnya.

Melayani dengan cepat, mudah dan transparan,

memang sudah menjadi komitmen seluruh jajaran kepolisian. Seperti dikatakan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Drs Condro Kirono, sejak tahun 2005, Direktorat lalulintas Polda Metro Jaya sudah memiliki program yang jelas dalam upaya memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat. Adanya komitmen tinggi dari pimpinan untuk mengubah system, penyediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas informasi teknologi (IT) yang merupakan aspek tak kalah penting, makin memperkuat komitmen tersebut.

"Jadi sesungguhnya dengan peluncuran program Quick Win ini, kita tinggal meningkatkan saja lagi melalui transparansi pelayanan," kata Kombes Pol Condro Kirono. "Dan kalau bicara reformasi pelayanan SIM, STNK dan BPKB, rasanya kita sudah mereformasi sejak lama, dalam lingkungan pelayanan kita. Kita sudah lama mereformasi diri."

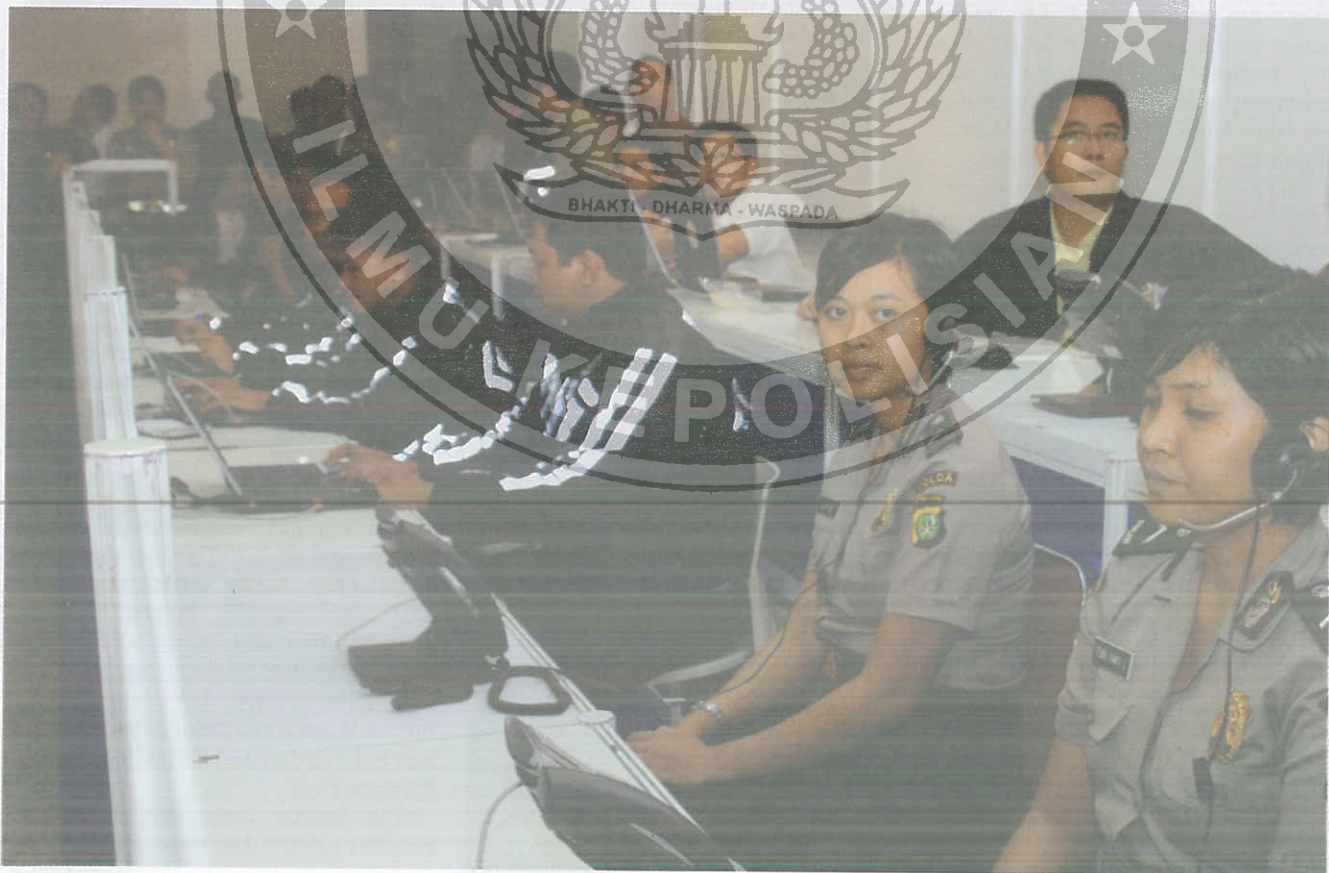


FOTO: SSB